

PERAN PEREMPUAN DALAM TIM SUKSES PASANGAN JAROT ANSORI PADA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

Loya Lani Gezi Raka Siwi^{1*}, Joni Firmansyah²

¹²Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: gesiraka792@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Submitted: 25 April 2026 Accepted: 06 Juni 2026 Published: 30 Juni 2026	<i>This study aims to examine the role of women in the campaign team of the Jarot-Ansori pair in the 2024 Sumbawa Regional Head Election, including forms of involvement, driving and inhibiting factors, and their contributions to campaign effectiveness. The research is situated within the local political dynamics of Sumbawa Regency, which recorded a high voter turnout of 80.6%, with women constituting the majority of voters (50.7%), while their participation in strategic political structures remains limited. The study employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through direct observation of campaign activities, in-depth interviews with the campaign team leader, female campaign team members, female voters, and academics, as well as documentation from official and secondary sources. Data analysis was conducted using Role Theory and Political Recruitment Theory to analyze women's positions, functions, and involvement in the campaign team. The findings reveal that women perform normative roles as social communicators and community liaisons, as well as actual roles through door-to-door outreach, coordination of campaign activities, and grassroots information gathering. Women are recruited informally through social networks, selected based on loyalty and performance, and developed through practical field experience, with placement largely in operational and communication roles. Although women make significant contributions to expanding campaign reach and building public trust, their access to strategic positions remains constrained by patriarchal culture, gender stereotypes, and role conflict between domestic responsibilities and political engagement.</i>
Keywords The Role of Women; Campaign Team; Gender Equality.	

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu konsep ideal yang saat ini diterapkan di hampir seluruh negara di dunia. Dalam teori politik, demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang paling representatif karena memberi ruang bagi keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip fundamental demokrasi meliputi kebebasan individu, persamaan di hadapan hukum, dan adanya mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan negara. Dalam praktik demokrasi yang sehat, setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih (Riyani & Putri, 2023).

Dewasa ini, banyak negara memilih sistem demokrasi karena dianggap mampu memberikan keadilan yang sejati bagi setiap warganya. Menurut Cornelia *et al.* (2024), demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan kebijakan dan keputusan politik melalui mekanisme partisipatif. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Hal ini berbeda dengan konsep pemerintahan kuno yang sering kali tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan harus mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan yang berprinsip demokratis, pemilihan umum (Pemilu) memiliki peran kunci dalam membentuk dasar demokrasi. Pemilu dianggap sebagai instrumen utama dalam demokrasi dan sebagai ekspresi dari kedaulatan rakyat dalam memilih para perwakilan dan pemimpin yang memiliki visi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta memiliki kapasitas dan tanggung jawab dalam usaha meningkatkan kesejahteraan publik. Di Indonesia, pemilu menjadi sebuah agenda yang penting untuk dilaksanakan sebagai manifestasi nyata dari demokrasi dan berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis (Sudirman *et al.*, 2023).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan langkah strategis dalam membangun akuntabilitas lokal, kesetaraan politik, dan responsivitas pemerintahan daerah. Pilkada merupakan pilar penting dalam pembangunan politik dan sosial di tingkat daerah, karena menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Lebih dari sekadar proses elektoral, hasil dari pilkada diharapkan mampu membawa perbaikan dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Pilkada yang dikelola secara profesional dan demokratis akan berdampak langsung pada terciptanya pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada perubahan positif dalam kehidupan politik lokal (Selfiyana dan Muhtadi, 2025).

Salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis adalah adanya partisipasi publik. Partisipasi publik menjadi elemen krusial dalam penguatan sistem demokrasi. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi dan kepentingannya, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi publik tidak hanya terbatas pada pemilu, tetapi juga mencakup kegiatan seperti keterlibatan dalam pembuatan kebijakan publik, diskusi kebijakan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan pemerintahan. Semakin tinggi tingkat partisipasi publik, semakin kuat kontrol masyarakat terhadap kekuasaan negara, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar mewakili kepentingan rakyat (Riskiyono, 2022).

Dalam demokrasi yang ideal, partisipasi publik juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi warga negara. Dengan berpartisipasi, masyarakat dapat memahami lebih dalam tentang mekanisme pemerintahan, proses pembuatan kebijakan, dan hak-hak politik yang mereka miliki. Oleh karena itu, partisipasi publik berkontribusi langsung pada peningkatan kesadaran politik dan memperkuat legitimasi pemerintah. Tanpa partisipasi yang memadai, demokrasi bisa berubah menjadi oligarki di mana keputusan penting hanya diambil oleh segelintir elit (Kontu *et al.*, 2024).

Dalam sistem demokrasi, keterlibatan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi prasyarat terwujudnya pemerintahan yang representatif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan kontitusi Negara telah memberi ruang untuk setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin. Setiap warga Negara tanpa kecuali, baik laki-laki maupun perempuan di semua lapisan masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan kesempatan yang sama di bidang politik.

Secara konstitusional, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk aktif berpartisipasi di masyarakat termasuk dalam bidang politik. Partisipasi perempuan dalam bidang politik merupakan kegiatan sukarela kaum perempuan dari berbagai aktivitas, seperti pengamat politik, dosen, aktivis perempuan, pejabat pemerintah atau anggota parlemen, anggota partai dan sebagainya, sehingga para perempuan melibatkan diri secara aktif dalam bidang politik, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan suatu kebijakan (Setiawati & Agustini, 2024).

Partisipasi perempuan dalam bidang politik merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan kesetaraan gender. Namun demikian, pada kenyataannya representasi perempuan dalam struktur kekuasaan masih tergolong rendah. Keterwakilan perempuan dalam berbagai lapangan kehidupan pemerintahan formal, baik dalam lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif selalu menempati posisi minoritas, bahkan ada lembaga yang tidak ada sama sekali perempuan yang duduk di dalamnya. Partai politik yang menjadi hulu dari tindakan kebijakan keterwakilan perempuan atau *affirmative action* belum mampu dan belum berkomitmen kuat untuk melibatkan perempuan sebagai sosok yang strategis dan menguntungkan mereka (Adriani dan Maulia, 2024).

Sepanjang sejarahnya, perempuan Indonesia menjadi kelompok minoritas yang terabaikan pada area politik. Profil perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam situasi dilematis, karena persepsi yang melakat pada perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah laki-laki. Fenomena ini menunjukkan masih adanya kesenjangan gender yang cukup signifikan, di mana ruang-ruang politik strategis masih didominasi oleh laki-laki. Perempuan seringkali hanya ditempatkan pada posisi pendukung, pelaksana teknis, atau sekadar menjadi pelengkap dalam kepengurusan organisasi politik (Nuriana *et al.*, 2023).

Di tingkat lokal, ketimpangan ini semakin jelas terlihat. Di banyak daerah, partisipasi perempuan dalam politik masih dipandang secara skeptis oleh masyarakat. Beberapa gejala yang terlihat antara lain adalah minimnya jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau kepala daerah, kebanyakan perempuan hanya mengisi posisi sebagai staff atau bagian administrasi pada instansi pemerintah. Adanya stereotip gender yang menyatakan bahwa perempuan yang terjun dalam dunia politik dianggap telah melawan kodratnya sebagai perempuan, dimana secara kultural perempuan ditempatkan dalam ranah domestik, sementara laki-laki ditempatkan dalam ranah publik, dan politik dikategorikan dalam ranah publik (Kurniawan *et al.*, 2025).

Kabupaten Sumbawa memiliki karakteristik unik. Secara demografis, perempuan di Kabupaten Sumbawa selalu menempati porsi yang lebih besar dibandingkan laki-laki dalam daftar pemilih tetap. Hal ini menjadikan perempuan sebagai kekuatan elektoral yang sangat menentukan hasil suatu kontestasi politik. Data KPU menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan mencapai 50,7% dengan tingkat partisipasi yang mencapai 80,6%. Angka ini mencerminkan kesadaran politik yang tinggi di kalangan masyarakat. Namun dalam praktiknya, peran perempuan seringkali tereduksi pada aspek mobilisasi massa semata, sementara ruang untuk berbicara dan menentukan arah kebijakan masih sangat terbatas dan didominasi oleh laki-laki. Meskipun kerangka hukum mendukung perwakilan perempuan, namun pada partisipasi aktualnya masih rendah, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik.

Kontestasi Pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2024 menjadi momentum yang menarik untuk dikaji, khususnya bagaimana dinamika gender berlangsung dalam Tim Sukses pasangan calon Jarot-Ansori. Sebagai salah satu kontestan utama, struktur tim sukses ini merekrut banyak perempuan dalam barisan kepengurusan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengupas tuntas bagaimana posisi tawar perempuan, bentuk pekerjaan yang diemban, proses perekrutan, serta tantangan budaya dan struktural yang dihadapi. Penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai representasi gender dalam politik, peran media dalam membentuk opini publik, serta perlunya kebijakan dan dukungan kelembagaan yang mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam ranah politik. Hal ini memperkuat validitas dan relevansi penelitian ini dalam menelaah dinamika persepsi masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam politik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2021), penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena atau kejadian apa adanya tanpa memanipulasi variabel, menggunakan data non-numerik seperti wawancara dan observasi untuk memahami kenyataan sosial secara mendalam. Tujuannya adalah memberikan gambaran utuh dan rinci mengenai karakteristik, kualitas, serta keterkaitan dari suatu kejadian atau keadaan yang diamati.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami makna, mendeskripsikan fenomena, dan menggali pengalaman informan secara mendalam terkait peran perempuan dalam politik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2024.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Leksono (2020), data kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif bersifat non-numerik, sehingga tidak dapat diukur secara langsung. Pada penelitian ini, data kualitatif merupakan jawaban atas pertanyaan yang dikumpulkan secara langsung dari informan penelitian melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan analisis dokumen/teks berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer. Menurut Menurut Kriyantono (2021), data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tangan pertama di lapangan. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, yaitu seluruh perempuan yang tergabung dalam Tim Sukses Jarot Ansori pada pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2024.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di seluruh daerah Kabupaten Sumbawa menurut sebaran wilayah kerja Tim Sukses pasangan Jarot-Ansori. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan yang kuat bahwa wilayah kerja tim sukses merupakan representasi yang valid dari basis dukungan politik secara merata. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat mencakup dinamika aspirasi dari seluruh wilayah di Kabupaten Sumbawa.

Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai peran yang telah dilakukan perempuan dalam Tim Sukses pasangan Jarot Ansori untuk memenangkan suara pada pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2024. Selama waktu penelitian tersebut diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan peran, proses rekrutmen, serta faktor pendorong dan penghambat keterlibatan perempuan dalam Tim Sukses pasangan Jarot Ansori.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan secara langsung dan terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman dan pandangan informan dalam kegiatan kampanye Tim Sukses Jarot Ansori pada pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2024. Adapun informasi pada penelitian ini terdiri dari

koordinator perempuan, anggota tim sukses, relawan, dan tokoh masyarakat. Kedua, observasi partisipatif (*participatory observation*) yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam beberapa kegiatan kampanye untuk melihat secara nyata bagaimana interaksi dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam Tim Sukses Jarot Ansori pada pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2024. Ketiga, dokumentasi (*documentation*) yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti gambar, video, dan arsip tertulis yang relevan berkaitan dengan kegiatan kampanye Tim Sukses Jarot Ansori pada pilkada Kabupaten Sumbawa tahun 2024.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2019) yang meliputi tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan untuk memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian dengan mengacu pada teori kepemimpinan transformasional.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai informan yang berbeda (kepala sekolah, guru, dan siswa). Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memvalidasi temuan penelitian (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, ditemukan bahwa peran perempuan dalam Tim Sukses Jarot-Ansori memiliki dinamika yang unik. Secara umum, keterlibatan perempuan sangat masif dan terlihat jelas dalam kegiatan-kegiatan kampanye, namun terdapat perbedaan yang mencolok antara kontribusi yang diberikan dengan posisi tawar yang dimiliki dalam struktur organisasi. Pembahasan berikut menguraikan temuan tersebut secara terintegrasi.

1. Dimensi Peran Perempuan: Antara Substansi dan Struktur

Dalam analisis teori peran (*role theory*), perilaku seseorang ditentukan oleh ekspektasi sosial dan posisi yang mereka tempati. Dalam konteks tim sukses, peran perempuan dapat dilihat dari tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu peran normatif-sosial, peran operasional, dan peran strategis.

a. Peran Normatif dan Sosial

Hasil observasi menunjukkan bahwa perempuan memiliki keunggulan komparatif yang sangat besar dalam membangun relasi sosial dan kepercayaan publik. Mereka berfungsi sebagai komunikator sosial yang efektif. Dengan gaya komunikasi yang dianggap lebih lembut, santun, dan persuasif, perempuan lebih mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya kelompok ibu-ibu dan keluarga. Hal ini sejalan dengan karakteristik masyarakat Sumbawa yang sangat menjunjung tinggi nilai sopan santun dan hubungan kekerabatan.

b. Peran Normatif dan Sosial

Selain normatif, perempuan juga bertindak sebagai pembangun kedekatan emosional. Kehadiran mereka tidak hanya sekadar menyosialisasikan program, tetapi juga menjadi jembatan aspirasi yang mampu mendengarkan keluhan kesah warga. Dalam masyarakat yang religius, perempuan juga berperan sebagai

penjaga nilai moral, di mana kehadiran mereka memberikan citra positif dan kesan bahwa kegiatan kampanye dilakukan dengan etika dan nilai-nilai kebaikan.

c. Peran Aktual dan Operasional

Secara teknis, peran perempuan sangat nyata dan dominan dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. Mereka adalah mobilisator massa yang handal. Memanfaatkan jaringan yang sudah terbentuk sebelumnya seperti pengurus PKK, majelis taklim, arisan, dan kelompok seni, perempuan mampu menggerakkan orang banyak dengan efektif. Aktivitas seperti kampanye door-to-door, kunjungan desa, hingga pengumpulan massa dalam acara besar sangat bergantung pada peran aktif perempuan.

Selain itu, perempuan juga sangat diandalkan dalam aspek administrasi dan logistik. Ketelitian, kerapian, dan kemampuan manajemen yang dimiliki membuat mereka dipercaya mengurus berbagai kebutuhan teknis yang detail, mulai dari surat-menyurat, dokumentasi, hingga konsumsi kegiatan. Ini menunjukkan bahwa secara substansi, kontribusi perempuan sangat vital dan menjadi "mesin" penggerak utama di lapangan.

d. Peran Strategis: Kesenjangan Struktural

Meskipun peran di lapangan sangat besar, temuan penelitian menunjukkan fakta yang kontras pada level pengambilan keputusan. Dalam dimensi ini, peran perempuan masih sangat terbatas dan marjinal. Rapat-rapat besar yang membahas strategi besar, negosiasi politik, pembagian wilayah, dan kebijakan internal masih didominasi oleh unsur laki-laki.

Perempuan lebih banyak ditempatkan pada posisi koordinator bidang atau pelaksana, jarang yang duduk sebagai penentu kebijakan puncak. Hal ini mengindikasikan adanya pembagian kerja yang bersifat gendered, di mana laki-laki diposisikan sebagai "otak" atau pemikir strategi, sedangkan perempuan diposisikan sebagai "tangan" atau pelaksana. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan masih bersifat substantif dalam tenaga, namun belum setara secara struktural.

2. Proses Rekrutmen: Pola Informal dan Berbasis Jaringan

Berdasarkan teori rekrutmen politik (*political recruitment theory*), mekanisme perekrutan anggota tim sangat menentukan komposisi dan kualitas organisasi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses pemasukan kader perempuan dalam Tim Sukses Jarot-Ansori memiliki karakteristik khusus. Berikut tahapan perekrutannya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Informan:

Tabel 1. Proses Rekrutmen

No	Aspek Pengajuan Calon	Rincian Detail	Tujuan
1	Persiapan Informasi Pengajuan	Pedoman, formulir, berkas, dan platform pengajuan	Memastikan informasi jelas dan terstandarisasi
2	Pembagian Informasi & Promosi	Publikasi informasi, sosialisasi, brosur, dan kontak person	Meningkatkan partisipasi calon yang sesuai
3	Jenis Pengajuan Calon	Pengajuan mandiri, pihak ketiga, dan rekomendasi	Mengumpulkan calon dari berbagai sumber
4	Persyaratan Calon	Syarat umum, khusus, dan administratif	Menyaring calon yang memenuhi kelayakan
5	Proses Verifikasi Berkas	Pemeriksaan, validasi, seleksi, dan pemberitahuan	Menjamin keakuratan dan kelengkapan data

6	Pendaftaran Akhir & Konfirmasi	Konfirmasi, nomor pendaftaran, jadwal, dan administrasi	Memastikan calon siap mengikuti seleksi lanjutan
---	--------------------------------	---	--

Proses rekrutmen cenderung bersifat informal dan personal. Perekrutan lebih banyak dilakukan melalui ajakan langsung, rekomendasi dari tokoh, atau berdasarkan jaringan pertemanan dan kekerabatan yang sudah terbangun sebelumnya. Pola ini umum terjadi dalam politik lokal di mana kepercayaan dan kedekatan personal menjadi modal utama.

Kriteria yang dicari dalam seleksi perempuan tidak hanya melihat kapasitas intelektual, tetapi lebih menekankan pada potensi elektoral, penerimaan masyarakat, dan loyalitas. Figur perempuan yang sudah dikenal baik, disegani, dan memiliki basis pengikut di daerahnya lebih diprioritaskan.

Namun, dalam penempatan posisi, masih terlihat adanya pengaruh stereotip gender. Perempuan cenderung lebih sering ditempatkan pada divisi-divisi yang dianggap sesuai dengan karakter feminin, seperti Divisi Hubungan Masyarakat, Divisi Perempuan dan Keluarga, atau Sekretariat, sementara posisi-posisi yang dianggap membutuhkan ketegasan atau kekuatan fisik lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Hal ini secara tidak sadar membatasi ruang gerak perempuan untuk mengembangkan kapasitas di bidang strategis.

3. Faktor Pendorong dan Penghambat

Keberhasilan perempuan berkontribusi serta kendala yang mereka hadapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi.

a. Faktor Pendorong

Pertama adalah modal sosial dan jaringan. Perempuan di Sumbawa memiliki akar yang kuat dalam organisasi kemasyarakatan, yang menjadi modal siap pakai untuk kepentingan politik. Kedua adalah karakteristik komunikasi yang empatik. Kemampuan perempuan dalam membangun hubungan personal menjadi nilai tambah yang sulit digantikan. Ketiga adalah dukungan internal dari pasangan calon dan ketua tim yang memberikan apresiasi terhadap peran perempuan, hal ini menjadi motivasi tersendiri untuk berkarya lebih maksimal.

b. Faktor Penghambat

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah budaya patriarki yang masih kuat. Pandangan bahwa politik adalah ranah laki-laki masih melekat di masyarakat, sehingga perempuan yang terlalu aktif berpolitik terkadang mendapat stigma negatif atau dianggap mengabaikan tugas rumah tangga.

Hambatan kedua adalah konflik peran ganda. Ini adalah masalah paling nyata yang dihadapi informan. Perempuan harus membagi waktu, tenaga, dan pikiran antara mengurus suami, anak, dan pekerjaan rumah tangga dengan kegiatan kampanye yang padat dan seringkali berlangsung hingga malam hari. Beban ganda ini seringkali menjadi alasan utama mengapa perempuan sulit untuk terlibat lebih dalam atau menduduki posisi tinggi yang membutuhkan konsentrasi penuh waktu.

Selain itu, keterbatasan akses informasi dan pembekalan juga menjadi penghambat. Seringkali informasi penting atau undangan rapat strategis tidak menyentuh lapisan bawah, sehingga pengetahuan perempuan terbatas pada tugas yang dikerjakan saja, tanpa memahami gambaran besar politik secara menyeluruh. Kurangnya pelatihan kepemimpinan juga membuat perempuan kurang percaya diri untuk tampil sebagai pemimpin atau pengambil keputusan.

PEMBAHASAN

Dalam penyelenggaraan proses pemilihan, baik Pemilu maupun Pilkada, partisipasi politik merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan. Partisipasi ini menjadi komponen utama dalam pemilihan, bersama dengan keberadaan peserta, pemilih, dan penyelenggara. Selain itu, partisipasi politik mencerminkan salah satu ciri penting dari modernisasi sistem politik, berfungsi sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pemilihan, memberikan legitimasi terhadap pemerintahan yang terbentuk, serta menjadi perwujudan dari jaminan konstitusional atas hak-hak politik setiap warga Negara (Suhenty, 2022).

Partisipasi warga negara dalam pemilu dan Pilkada dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti menggunakan hak pilih, terlibat sebagai penyelenggara, menjadi relawan dalam pengawasan, atau ikut serta dalam kelompok kepentingan. Keterlibatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan kebijakan, meningkatkan kesadaran politik, memperkuat sistem demokrasi, serta menjamin terpenuhinya hak-hak politik setiap individu. Agar partisipasi politik menjadi lebih luas dan inklusif, diperlukan penciptaan lingkungan yang kondusif, antara lain dengan memastikan akses yang setara terhadap informasi politik, menyelenggarakan pendidikan politik yang berkualitas, mengawal proses politik secara transparan, serta menghapus berbagai hambatan sosial dan struktural yang dapat menghambat keterlibatan aktif individu, kelompok, maupun organisasi tertentu (Selfiyana dan Muhtadi, 2025).

Dalam arus perubahan global yang menekankan kesetaraan gender, partisipasi politik perempuan bukan hanya kebutuhan mendesak, melainkan juga sebuah keharusan untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi aspek penting yang layak mendapat perhatian dalam diskursus Pilkada. Pilkada sendiri merupakan aktivitas politik yang krusial dalam konteks otonomi daerah, karena di dalamnya berlangsung proses komunikasi serta pembentukan opini di antara berbagai aktor politik, media, dan masyarakat. Namun demikian, isu kesetaraan gender di ruang publik masih sering menjadi perdebatan tanpa adanya penyelesaian yang tegas mengenai hak-hak politik perempuan di Indonesia (Lestari, 2024).

Pembahasan mengenai kesetaraan gender dalam politik tidak dapat dipisahkan dari diskursus demokrasi yang sehat. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan merupakan bagian penting dari prinsip hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik memiliki dasar yang kuat, karena salah satu ciri utama negara demokratis adalah menjamin kebebasan berpendapat dan partisipasi politik seluruh warga tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan berhak terlibat aktif dalam proses pengawasan pemilu. Jika keterlibatan perempuan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan politik diabaikan, maka hal itu menandakan bahwa demokrasi belum berjalan secara utuh (Nasution dan Ritonga, 2024).

Partisipasi perempuan sangat penting dalam menciptakan Pilkada yang demokratis. Mereka dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara, memastikan bahwa semua suara, termasuk dari kelompok perempuan, terdengar dan diperhitungkan. Perempuan memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, terutama di lingkungan keluarga dan komunitas terdekat. Melalui peran tersebut, perempuan dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang mampu menjaga stabilitas lingkungan, menyebarkan informasi yang akurat, serta menanamkan nilai-nilai politik yang sehat dan demokratis. Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam dunia politik menjadi unsur penting dalam mendorong terciptanya proses demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan (Bintari, 2021).

Secara umum, tingkat partisipasi perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Sumbawa masih tergolong rendah. Rendahnya keterlibatan perempuan dalam dunia politik tidak terlepas dari berbagai faktor utama, yaitu budaya patriarki yang masih kuat. Selama ini perempuan selalu ditempatkan sebagai *second person* dalam setiap sendi kehidupan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana paham patriarki yang selama ini dianut, diwariskan, dan diteruskan dalam masyarakat masih dianggap sebagai pemahaman yang wajar dan seharusnya berlaku. Patriarki memandang perempuan sebagai anggota masyarakat yang memiliki strata lebih rendah dibanding laki-laki. Dengan adanya budaya patriarki, perempuan berada dalam kekuasaan laki-laki. Perempuan tidak bisa menyampaikan pendapat, pemikiran, dan keinginannya secara terbuka. Komunikasi dan ruang gerak mereka seolah dibatasi dan hanya menjadi obyek dari semua keputusan dan pemikiran laki-laki (Hapsari dan Ilmar, 2024).

Dengan demikian, upaya peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia politik membutuhkan strategi yang komprehensif, tidak hanya melalui kebijakan afirmatif dan perluasan akses, tetapi juga melalui pendidikan politik yang berkelanjutan serta dukungan kultural yang mampu menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar dalam menjaga kualitas demokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi kampanye pasangan Jarot-Ansori dalam Pilkada 2024 memanfaatkan berbagai pendekatan yang saling terintegrasi, yaitu grassroots mobilization, personalized campaign, integrated communication, dan issue-based campaign. Keempat strategi tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan membentuk satu kesatuan yang berorientasi pada penguatan dukungan politik di tingkat akar rumput. Keterlibatan perempuan memiliki peran penting dalam pelaksanaan strategi kampanye, khususnya pada aktivitas mobilisasi komunitas, komunikasi interpersonal, dan penyampaian isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Perempuan berkontribusi secara signifikan dalam membangun kedekatan emosional dengan pemilih serta memperluas jangkauan komunikasi kampanye melalui jaringan sosial dan media digital. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai agen komunikasi politik di tingkat lokal.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap perumusan strategi dan pengambilan keputusan politik. Dominasi aktor laki-laki dalam struktur strategis kampanye menyebabkan peran perempuan lebih terkonsentrasi pada ranah operasional, sehingga potensi kontribusi perempuan dalam penentuan arah dan strategi kampanye belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya hambatan institusional dan kultural yang bersifat gender dalam praktik politik lokal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas strategi kampanye politik tidak hanya ditentukan oleh variasi pendekatan yang digunakan, tetapi juga oleh sejauh mana strategi tersebut diintegrasikan secara struktural dan inklusif. Penguatan peran perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal serta mendorong praktik kampanye politik yang lebih setara dan berkelanjutan.

SARAN

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas: Perlu adanya pelatihan kepemimpinan dan manajemen politik bagi kader perempuan agar lebih siap menduduki posisi strategis.
2. Kebijakan Afirmatif: Pimpinan partai dan tim sukses perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam diskusi kebijakan, bukan hanya sebagai pelaksana.
3. Perubahan Pola Pikir: Diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menghilangkan stereotip negatif dan memandang peran politik perempuan sebagai hal yang wajar dan penting dalam demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131-136.
- Bintari, A. (2022). Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 13-22.
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. (2024). Implementasi prinsip demokrasi dalam hukum tata negara: Tinjauan terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295-302.
- Hapsari, R. K., & Ilmar, A. (2024). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Keterwakilan Perempuan pada Rekrutmen Calon Anggota Bawaslu RI Periode 2022-2027. *Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan* 23(2), 171-182.
- Kontu, R., Santoso, Y., & Prasetyo, M. (2024). *Partisipasi Publik dan Demokrasi Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kriyantono, R. (2021). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif (Disertai Contoh Praktis)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kurniawan, N., Wahyuni, S., Lestari, N., Ferdita, T., & Farid, M. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Partisipasi Perempuan Dalam Politik. *Jurnal Politik*, 3(1), 27-33.
- Leksono, S. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lestari, S. I. (2024). Partisipasi Politik Perempuan dalam Diskursus Pemilu di Provinsi Lampung. *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 153-167.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 40)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. N., & Ritonga, S. H. H. (2024). Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Penyelenggara Pemilu Sebagai Hak Asasi Manusia. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(5), 42-52.
- Nuriana, R., Satriadi, Rahmat, M., & Budiman, S. (2023). Partisipasi Politik Pemilihan Perempuan di Kepulauan Riau. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(1), 227-239.

- Riyani, T., & Putri, M. (2023). Demokrasi Sebagai Sistem Partisipatif: Perspektif Hukum Dan Politik. *Jurnal Sosial Politik*, 19(1), 55-70.
- Riskiyono, A. (2022). Partisipasi Publik dan Penguatan Demokrasi di Tingkat Lokal. *Jurnal Demokrasi dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 112-129.
- Selfiyana, U., & Muhtadi. (2025). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Pada Pilkada Tahun 2024 Di Kota Metro. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1-15.
- Setiawati, T., & Agustini, V. D. (2024). Komunikasi dan Partisipasi Perempuan Dalam Politik Elektoral. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 7(1), 162-173.
- Sudirman, Muhammad, R., & Latief, M. I. (2023). Keterlibatan Kelompok Perempuan dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020 di Masa Covid-19. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 455-466.
- Suhenty, L. (2022). Relevansi Partisipasi Politik Perempuan dan Keterpilihan Perempuan dalam Pilkada Serentak 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 77-92.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.